

The Role of Kerobokan *Pakraman* Village in the 2018 Governor Election in Bali

By:

Hindi Brihaspathi Sudana¹ and Andy Omara, S.H., M.Pub&Int.Law., Ph.D.²

ABSTRACT

Pakraman Village exists and affects Balinese people in many aspects of their daily life, including politics. In term of politics, *Pakraman* Village has shown its role such as declaring political support towards certain candidate. This issue also happened in Bali Governor Election on 2018. Kerobokan *Pakraman* Village conducted a political declaration that contained support towards one particular candidate. Normatively at that time, any matters related to *Pakraman* Village are regulated in Bali Provincial Regulation Number 3 of 2003 Concerning *Pakraman* Village (hereby written as *Pakraman* Village Regulation). In March 2019, Bali Provincial Regulation Number 4 of 2019 Concerning *Adat* Village (hereby written as *Adat* Village Regulation) was enacted. This Legal Research analyze the role of Kerobokan *Pakraman* Village in the 2018 Governor Election in Bali based on *Pakraman* Village Regulation and the differences between *Pakraman* Village Regulation and *Adat* Village Regulation regarding political involvement of *Pakraman* Village.

This Legal Research is conducted through a juridical-empirical method. Juridical-empirical method is used in this legal research since it is important to find the answer for the research questions in form of primary data as the main data by conduct in-field research. The primary data was obtained from interview with several parties that related with this issue. This legal research also use secondary data obtained by literature research in order to complete the answer. The obtained data was analyzed using the qualitative method.

This Legal Research comes to conclusion that *firstly*, the role that conducted by Kerobokan *Pakraman* Village in the 2018 Governor in Bali is not in accordance with Article 13 of Bali Provincial Regulation Number 3 of 2003 Concerning *Pakraman* Village. *Secondly*, there are several differences between Bali Provincial Regulation Number 3 of 2003 and Bali Provincial Regulation Number 4 of 2019 in term of *Pakraman* Village political involvement, such as: 1) In regards of provision that regulates *prajuru* to minimize political influence; 2) The standards / degrees of how political development in *Pakraman* Village should be conducted.

Keywords: *Pakraman* Village, 2018 Governor Election in Bali, Regulation Concerning *Pakraman* Village.

¹ Student of the Faculty of Law Universitas Gadjah Mada (S1 IUP).

² Lecturer at the Department of Constitutional Law, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada.

Peranan Desa Pakraman Kerobokan pada Pemilihan Gubernur 2018 di Bali

Oleh:

Hindi Brihaspathi Sudana³ dan Andy Omara, S.H., M.Pub&Int.Law., Ph.D.⁴

INTISARI

Desa Pakraman hidup dan mempengaruhi masyarakat Bali dalam banyak aspek kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal politik. Desa Pakraman telah menunjukkan perannya dalam hal politik, salah satunya dalam bentuk dukungan politik terhadap kandidat tertentu. Hal ini juga terjadi pada Pemilihan Gubernur Bali pada tahun 2018. Desa Pakraman Kerobokan melakukan deklarasi politik yang berisi dukungan terhadap satu paslon tertentu. Pada saat itu secara normatif segala hal yang berkaitan dengan Desa Pakraman diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Desa Pakraman (dengan ini ditulis sebagai Perda Desa Pakraman). Pada bulan Maret tahun 2019, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat (dengan ini ditulis sebagai Perda Desa Adat) disahkan. Penelitian Hukum ini menganalisis peranan Desa Pakraman Kerobokan pada Pemilihan Gubernur 2018 di Bali berdasarkan Perda Desa Pakraman dan perbedaan hukum antara Perda Desa Pakraman dan Perda Desa Adat terkait keterlibatan politik Desa Pakraman.

Penulisan Hukum ini bersifat yuridis-empiris. Metode yuridis-empiris merupakan metode yang digunakan dalam Penulisan Hukum ini dikarenakan pentingnya mendapatkan data dalam bentuk data primer sebagai data utama untuk mendapatkan jawaban atas rumusan masalah. Data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan pihak terkait. Penulisan Hukum ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk melengkapi jawaban yang didapat atas data primer. Analisis terhadap data yang diperoleh dilaksanakan dengan metode kualitatif.

Penulisan Hukum ini menyimpulkan bahwa pertama, peranan yang dilakukan oleh Desa Pakraman Kerobokan pada Pemilihan Gubernur 2018 di Bali tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 13 pada Perda Desa Pakraman. Kedua, terdapat beberapa perbedaan ketentuan hukum antara Perda Desa Pakraman dan Perda Desa Adat terkait keterlibatan politik Desa Pakraman, seperti dalam hal: 1) Ketentuan yang mengatur bagaimana prajuru meminimalisir kepentingan politik; 2) Standar / tolak ukur terhadap bagaimana suatu pembangunan politik di Desa Pakraman harus dilaksanakan.

Kata Kunci: *Desa Pakraman, Pemilihan Gubernur 2018 di Bali, Peraturan Terkait Desa Pakraman.*

³ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

⁴ Dosen Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.